



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : I NYOMAN EDY SUBAGIARTHA
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 655506

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 180.000.000

1. Tanah Seluas 680 m2 di KAB / KOTA KLUNGKUNG, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 101.500.000

1. MOTOR, HONDA C1C02N16M21/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SP MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA XIHO2N35MT1 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
4. MOTOR, VESPA LX IGET 125 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 37.000.000
5. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR SOLO/ADV Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 308.790.219

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 590.290.219

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 590.290.219



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.